

ABSTRAK

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Angka kecelakaan kerja pada proyek pembangunan konstruksi di Indonesia adalah paling tinggi diantara sektor perusahaan lainnya. Berdasarkan statistik, terlihat yaitu insiden pekerjaan pada sektor konstruksi terus bertambah dari periode 2012 sampai 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa capaian dan faktor yang menjadi kendala dalam penerapan SMKK. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan gedung DPRD Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor tertinggi dalam implementasi SMKK pada proyek pembangunan gedung DPRD Kota Padang adalah tingkat penerapan dalam bidang rencana anggaran biaya 88,81%. Rencana anggaran biaya yang diterapkan pada proyek ini juga mengacu pada permen PUPR No.10 Tahun 2021 dengan memenuhi 9 komponen biaya penerapan SMKK. Untuk skor terendah pada evaluasi kinerja keselamatan konstruksi 85,93% ini dapat dilihat pada waktu pelaksanaan masih ada pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri SNI. Berdasarkan hasil yang di dapat maka disimpulkan bahwa penerapan SMKK oleh PT Nindya Karya Persero dalam proyek pembangunan gedung DPRD Kota Padang sudah diterapkan dengan sangat baik.

Kata Kunci : *SMKK, Permen PUPR No 10 Tahun 2021, Gedung DPRD*

ABSTRACT

Construction Safety Management System (SMKK) is part of the construction work implementation management system to ensure the realization of construction safety. The number of work accidents in construction construction projects in Indonesia is the highest among other company sectors. Based on statistics, it can be seen that the incidence of work in the construction sector continues to increase from the period 2012 to 2014. This study aims to analyze the achievements and factors that become obstacles in the application of SMKK. This research was conducted on the construction project of the Padang City DPRD building. The method used in this study uses quantitative research methods by observation. The results showed that the highest score in the implementation of SMKK in the construction project of the Padang City DPRD building was the application rate in the field of budget plan costs of 88.81%. The cost budget plan applied to this project also refers to PUPR Regulation No. 10 of 2021 by meeting 9 components of the cost of implementing SMKK. For the lowest score on the construction safety performance evaluation of 85.93%, it can be seen that at the time of implementation there were still workers who did not use SNI personal protective equipment. Based on the results obtained, it is concluded that the application of SMKK by PT Nindya Karya Persero in the construction project of the Padang City DPRD building has been implemented very well.

Keywords: *SMKK, PUPR Regulation No. 10 of 2021, DPRD Building*